

**MBG di Belitung:
Dari Program
Nasional ke
Ketahanan Wilayah**

INFO KITA:

Admin Game Keamanan Siber DPN
ASN DPN ikuti Latsarmil Komcad Matra Darat
Sinergi Komunikasi Publik untuk Pertahanan Negara

ARSIP SEBAGAI BENTENG PERTAHANAN NEGARA

OPINI :

Penguatan Interoperabilitas Alutsista TNI Untuk Pertahanan Nasional Terpadu.
Bukan Sekadar Mutasi: Strategi Menempatkan ASN di Lembaga Baru.
Memperkuat Partisipasi Publik untuk Ekosistem Inovasi Nasional.



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Majalah Dewan Pertahanan Nasional Majalah Catra Edisi XLI Tahun 2025 hadir menyapa para pembaca. Kehadiran majalah ini bukan sekadar sebagai media informasi, melainkan juga sebagai ruang edukasi, refleksi, dan inspirasi mengenai isu-isu pertahanan, keamanan, serta kebijakan strategis bangsa.

Edisi kali ini mengangkat tema besar tentang peran Arsip sebagai benteng pertahanan negara, sejalan dengan dinamika lingkungan strategis global maupun regional yang kian kompleks. Pembaca akan disuguhkan berbagai artikel tajuk utama, opini, liputan kegiatan, hingga rubrik "Tahukah Anda" yang menyajikan informasi ringan namun tetap sarat makna.

Melalui majalah ini, kami berharap tercipta pemahaman yang lebih luas di kalangan masyarakat, akademisi, maupun praktisi tentang pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga pertahanan nasional. DPN hadir sebagai simpul koordinasi, wadah kolaborasi, dan sekaligus *think tank* strategis bagi Presiden Republik Indonesia dalam merumuskan kebijakan pertahanan negara.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung terbitnya majalah ini, khususnya para penulis, kontributor, dan pembaca setia. Semoga sajian kami dapat memberi manfaat, menambah wawasan, serta memperkuat semangat kebangsaan.

Salam
Redaksi Majalah Dewan Pertahanan Nasional

hormat,

TAJUK UTAMA :

- Arsip sebagai Benteng Pertahanan Negara: Mencegah Konflik Sosial melalui Pengelolaan Data yang Autentik.....4

INFO KITA :

- MBG di Belitung: Dari Program Nasional ke Ketahanan Wilayah.....7
- Admin Game Keamanan Siber DPN dan Lompatan Kolaborasi Nasional..... 8
- ASN DPN ikuti Latsarmil Komcad Matra Darat di Pusdikzi.....10
- Sinergi Komunikasi Publik untuk Pertahanan Negara.....12
- Delegasi DPN RI Laksanakan Rangkaian Kunjungan Strategis ke Uni Emirat Arab.....14

OPINI :

- Penguatan Interoperabilitas Alutsista TNI Untuk Pertahanan Nasional Terpadu.....16
- Memperkuat Partisipasi Publik untuk Ekosistem Inovasi Nasional.....18
- Bukan Sekadar Mutasi: Strategi Menempatkan ASN di Lembaga Baru..... 20
- Lembaga Nonstruktural Dalam Perspektif Kelembaga Instansi Pemerintah Pusat.....22
- Kualitas Infrastruktur Publik & Efektivitas Anggaran.....24

KEBIJAKAN PEMERINTAH :

- Kenaikan Gaji Aparatur Negara 2025.....26

TAHUKAH ANDA :

- 5 Fakta Ilmiah tentang Waktu yang Jarang Diketahui.....28

**Istilah Sosmed Gen Z
(dengan Bahasa Inggris)**

1. *Slay*
Berpenampilan keren atau melakukan sesuatu dengan luar biasa.
2. *Fire*
Sangat keren, luar biasa.
3. *I'm dead / I'm crying*
Sangat lucu (tidak benar-benar menangis atau mati).
4. *Sus*
Mencurigakan (dari kata suspicious).
5. *Cringe*
Malu / aneh / tidak nyaman melihat sesuatu.
6. *Salty*
Kesal atau iri dengan hal kecil.
7. *Tea / Spill the tea*
Gosip atau cerita menarik
8. *Receipts*
Bukti (biasanya tangkapan layar gosip).
9. *Ate / She ate*
Melakukan sesuatu dengan sangat baik.
10. *Main character energy*
Percaya diri seperti tokoh utama film.
11. *NPC*
Orang yang membosankan / tidak punya pendapat (dari "Non-Player Character").
12. *Rizz*
Daya tarik romantis / kemampuan merayu.
13. *Sigma*
Pria independen, tidak ikut arus (terkadang dipakai ironis).
14. *Skibidi / Gyatt / Ohio memes*
Istilah lucu absurd khas tren meme Gen Z.
15. *Love bombing*
Terlalu banyak kasih sayang di awal, lalu menjauh.



Arsip sebagai Benteng Pertahanan Negara: Mencegah Konflik Sosial melalui Pengelolaan Data yang Autentik

Oleh : Anindhita Primanisantiara Fildatie, S.IP., M.Han.

Di tengah kemajemukan Indonesia dengan ratusan suku, bahasa, dan ragam agama—persatuan bukanlah sesuatu yang hadir begitu saja. Ia harus terus dirawat. Sejarah mencatat, konflik sosial di Ambon, Sampit, Poso, dan berbagai daerah lain bukan hanya meninggalkan luka fisik dan ekonomi, tetapi juga trauma sosial yang panjang. Pemerintah lewat Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015 menegaskan: ancaman terhadap pertahanan negara tidak selalu datang dari luar, tetapi juga dari konflik internal antarkelompok di dalam negeri. Di sinilah arsip, yang sering dianggap sekadar urusan administratif, ternyata memegang peran strategis sebagai benteng pertahanan negara.

Dari Sengketa Data ke Konflik Sosial

Banyak konflik sosial di Indonesia berakar pada persoalan yang tampak “teknis”: sengketa tanah, batas wilayah, hak adat, hingga tafsir sejarah. Di balik semua itu, ada satu benang merah: data dan bukti tertulis.

Bayangkan perselisihan dua kelompok

warga yang sama-sama mengklaim satu kawasan tanah sebagai miliknya. Tanpa arsip yang jelas—sertifikat tanah, peta wilayah, berita acara, atau keputusan resmi—sengketa yang semula bersifat administratif mudah berubah menjadi konflik horizontal. Perbedaan tafsir atas dokumen, arsip ganda, arsip hilang, bahkan pemalsuan arsip, bisa memicu kecurigaan, ketidakpercayaan, hingga kekerasan terbuka.

Dalam perspektif Ichsan Malik, salah satu sumber konflik di Indonesia adalah konflik data: pemalsuan sejarah, perbedaan interpretasi data, ketiadaan dokumen autentik, hingga buruknya pengelolaan arsip. Konflik data ini berdiri sejajar dengan sumber konflik lain seperti konflik hubungan, struktural, kepentingan, dan nilai. Artinya, cara kita mengelola arsip bukanlah soal teknis belaka, tetapi berkaitan langsung dengan potensi muncul atau padamnya konflik sosial.

Arsip: Memori Kolektif dan Alat Kendali Konflik

Kesadaran akan pentingnya kearsipan



TAJUK UTAMA

dan kebijakan harus didukung oleh arsip yang disusun dan disimpan secara benar. Jika tidak, ruang abu-abu dalam dokumen inilah yang kelak bisa dimanfaatkan oleh provokator atau kelompok kepentingan untuk menyulut konflik.

Kerangka Dinamis: Bagaimana Arsip Bisa Mencegah Konflik?

Untuk memahami peran arsip dalam pencegahan konflik secara lebih utuh, dapat digunakan kerangka dinamis pencegahan dan resolusi konflik yang mencakup lima unsur: eskalasi–deeskalasi, faktor konflik, aktor konflik, pemangku kepentingan, dan kemauan politik penguasa.

1. Eskalasi dan deeskalasi konflik

Konflik sering dimulai dari sengketa kecil: perbedaan tafsir atas batas tanah, hak waris, atau status kawasan. Jika arsip yang dijadikan rujukan palsu, tumpang tindih, atau hilang, sengketa kecil akan mudah memanas. Sebaliknya, arsip autentik dan lengkap bisa menjadi dasar kuat untuk meredam konflik karena memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berselisih.

2. Faktor konflik

Salah satu faktor konflik paling umum adalah arsip ganda atau saling bertentangan. Dua pihak sama-sama memegang “dokumen resmi” yang berbeda isi. Di titik ini, sistem pengelolaan arsip yang lemah menjadi lahan subur bagi konflik. Standar kearsipan yang baku, sistem pencatatan digital yang rapi, dan prosedur verifikasi yang ketat diperlukan untuk mencegah munculnya faktor pemicu ini.

3. Aktor konflik

Dalam setiap konflik, selalu ada aktor: provokator, kelompok kepentingan, dan kelompok rentan yang terpengaruh. Di era digital, penyebaran hoaks berbasis “arsip”—misalnya foto dokumen, cuplikan berita lama yang dipelintir, atau berkas yang dimanipulasi—dapat mempercepat mobilisasi massa. Jika arsip resmi negara tidak mudah diakses, masyarakat akan kesulitan membedakan mana dokumen sah dan mana yang palsu. Di sinilah pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi yang terukur.

4. Pemangku kepentingan

Pemerintah daerah, lembaga adat, organisasi masyarakat, dan aparat penegak hukum memiliki kewenangan mengambil keputusan. Ketika mereka merujuk pada arsip yang benar, keputusan yang dihasilkan cenderung adil dan dapat diterima para pihak. Sebaliknya, keputusan

tercermin dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Di sana ditegaskan bahwa arsip adalah jati diri, memori, acuan, dan bentuk pertanggungjawaban kehidupan berbangsa dan bernegara. Arsip bukan hanya tumpukan berkas di gudang atau file digital di server; ia adalah rekam jejak keputusan, hak, kewajiban, dan sejarah kolektif bangsa.

Sebagai lembaga kunci, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) diberi mandat besar: menyusun kebijakan, melakukan pembinaan, dan mengelola arsip statis bernilai sejarah. Melalui regulasi seperti Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Aset Negara/Daerah, negara berupaya memastikan data penting—khususnya yang terkait aset publik—terkelola secara autentik dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini sangat vital untuk mencegah sengketa aset yang berpotensi memicu konflik sosial.

Namun, tanggung jawab menjaga arsip tidak berhenti di ANRI. Kementerian, pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, hingga organisasi masyarakat dan desa memiliki peran masing-masing. Setiap keputusan, transaksi,

TAJUK UTAMA

yang diambil tanpa basis arsip yang kuat mudah dianggap sepihak dan memicu ketidakpuasan.

5. Kemauan politik penguasa

Pada akhirnya, sebaik apa pun sistem kearsipan yang dimiliki, semuanya kembali pada political will. Penguasa yang berkomitmen pada keadilan akan menjadikan arsip autentik sebagai rujukan utama—bukan sekadar justifikasi formal. Mereka akan mendorong pembenahan kearsipan, menginvestasikan anggaran untuk digitalisasi, dan memastikan lembaga kearsipan bekerja independen dari tekanan kepentingan jangka pendek.

Kelima unsur ini berputar dalam satu lingkaran dinamis. Arsip bisa muncul sebagai akar masalah (ketika palsu, ganda, atau hilang), tapi juga bisa menjadi alat penyelesaian konflik yang kokoh (ketika autentik, lengkap, dan dikelola secara profesional).

Dari Gudang Berkas ke Garda Terdepan Pertahanan

Agar arsip benar-benar berfungsi sebagai benteng pertahanan negara, setidaknya ada beberapa langkah strategis yang perlu didorong:

- Memperkuat sistem kearsipan nasional

Digitalisasi arsip, standarisasi tata naskah dinas, pengamanan arsip vital, dan integrasi data antarinstansi adalah bagian dari upaya membangun satu sistem kearsipan yang solid. Bukan sekadar memindahkan kertas ke layar, tetapi menata ulang alur penciptaan, penyimpanan, dan pemusnahan arsip.

- Meningkatkan kesadaran kearsipan di semua level

Aparatur negara, dari pusat hingga desa, perlu memahami bahwa arsip adalah alat pelindung, bukan beban administrasi. Pelatihan berkala, sosialisasi, dan kampanye publik perlu menekankan bahwa satu dokumen yang hilang hari ini bisa menjadi sumber konflik berdarah di masa depan.

- Mendorong partisipasi masyarakat

Masyarakat, termasuk media dan organisasi sipil, dapat berperan mengawal pengelolaan arsip: mengajukan permohonan informasi, mengkritisi data yang tidak konsisten, dan ikut menjaga arsip komunitas (seperti arsip adat atau sejarah lokal). Arsip bukan hanya milik negara, tetapi juga milik warga yang ingin haknya diakui dan dilindungi.

- Mengintegrasikan kearsipan dalam kebijakan pertahanan

Dalam dokumen strategis pertahanan dan keamanan nasional, kearsipan perlu disebut secara eksplisit sebagai salah satu pilar pencegahan konflik. Dengan demikian, penguatan arsip akan dilihat sebagai investasi keamanan, bukan sekadar urusan administrasi dan tata usaha.

Penutup: Menjaga Bangsa Lewat Ingatan yang Tertata

Konflik sosial tidak lahir dalam ruang hampa; ia tumbuh dari ketidakpastian, ketidakadilan, dan ketidakpercayaan. Arsip yang autentik, utuh, dan mudah diverifikasi mampu memangkas tiga “ketidak-” itu sekaligus.

Ketika arsip dikelola secara asal-asalan, kita sedang membuka pintu bagi sengketa hak, manipulasi sejarah, dan pemutarbalikan fakta. Sebaliknya, ketika arsip dijaga dengan serius, kita menegakkan fondasi keadilan dan akuntabilitas dua syarat utama bagi pertahanan negara yang tangguh.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kearsipan memiliki peran strategis dan multidimensi dalam menjaga stabilitas nasional, jauh melampaui fungsi administrasi semata. Peran ini diatur secara tegas oleh Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 dan diimplementasikan melalui peran sentral ANRI dalam pembinaan dan penetapan kebijakan. Melalui kerangka dinamis pencegahan dan resolusi konflik, terlihat jelas bahwa pengelolaan arsip yang akuntabel, autentik, dan komprehensif menjadi faktor penentu dalam menekan eskalasi konflik yang dipicu oleh data palsu atau ganda. Oleh karena itu, pengelolaan arsip adalah tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa dari ANRI, pemangku kebijakan, hingga masyarakat demi menjaga memori kolektif, menjamin keadilan, dan mempertahankan keutuhan NKRI.

Arsip mungkin tidak berada di garis depan seperti tentara di medan perang atau diplomat di meja perundingan. Tapi di balik layar, ia adalah benteng sunyi yang menopang keputusan-keputusan penting negara. Menata arsip berarti menata ingatan bangsa. Dan bangsa yang ingat dengan jernih dan jujur adalah bangsa yang lebih siap menghadapi konflik, sekaligus lebih kuat mempertahankan keutuhan NKRI.



MBG di Belitung: Dari Program Nasional ke Ketahanan Wilayah

Kunjungan kerja Dewan Pertahanan Nasional (DPN) ke Kabupaten Belitung pada akhir November 2025 menegaskan bahwa keberhasilan program strategis nasional tidak hanya ditentukan oleh rancangan di pusat, tetapi terutama oleh dampaknya yang terasa di daerah. Dalam rangkaian agenda tersebut, DPN mengapresiasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menempatkannya sebagai instrumen penting untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat ketahanan wilayah. Perspektif ini menandai cara pandang yang semakin utuh bahwa kebijakan gizi anak bukan sekadar program sosial, melainkan investasi ketahanan nasional jangka panjang yang dimulai dari ruang kelas dan meja makan siswa.

Momentum utama kegiatan terlihat saat DPN meninjau langsung implementasi MBG di SDN 24 Tanjungpandan. Dalam suasana hangat dan penuh antusias, jajaran DPN berdialog dengan pihak sekolah dan para siswa guna memastikan program berjalan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata. Peninjauan ini dipimpin Deputy Bidang Geoekonomi DPN, Dr. Yayat Ruyat, yang menyampaikan apresiasi terhadap kesiapan sekolah serta dukungan pemerintah daerah. Sebagai bentuk penguatan konkret, DPN turut menyerahkan bantuan perlengkapan pendukung bagi siswa. Di sinilah dimensi kebijakan berpadu dengan realitas lapangan: MBG bukan sekadar angka target penerima, melainkan

kan pengalaman harian anak-anak yang merasakan perubahan pada energi, konsentrasi, dan semangat belajar.

Evaluasi DPN juga tidak berhenti pada seremoni. Pihak sekolah menyampaikan bahwa MBG sangat membantu, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu, dengan dampak yang terlihat pada peningkatan kehadiran, kondisi kesehatan, dan motivasi belajar. Testimoni siswa memperlihatkan sisi paling otentik dari keberhasilan program: layanan yang sederhana namun menyentuh kebutuhan dasar sehingga membuat mereka merasa diperhatikan dan lebih bersemangat mengikuti pembelajaran.

Sebelumnya, DPN juga menggelar pertemuan bersama Bupati Belitung, unsur Forkopimda, dan instansi vertikal untuk membahas Belitung dalam perspektif geoekonomi, ketahanan pangan, dan pariwisata, sekaligus menegaskan dukungan daerah terhadap program prioritas seperti MBG. Rangkaian agenda ditutup dengan penyerahan plakat penghargaan sebagai simbol penguatan sinergi pusat–daerah agar program nasional dapat diterjemahkan menjadi capaian wilayah yang berkelanjutan. Dengan landasan tata kelola yang semakin tegas melalui penguatan regulasi terkait MBG, pelaksanaan program di Belitung memberi contoh bagaimana kebijakan gizi dapat diposisikan sebagai strategi keamanan manusia: ketika anak-anak sehat, hadir di sekolah, dan belajar dengan gembira, negara sedang memperkuat kualitas generasi, stabilitas sosial, serta daya tahan produktif wilayah.



***Admin Game* Keamanan Siber DPN dan Lompatan Kolaborasi Nasional**

Oleh : Natalina Pakpahan, S.I.Kom

Di era ketika hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada sistem digital, ancaman terhadap keamanan siber tak ubahnya badai yang mengintai di balik langit cerah. Indonesia terus mempercepat transformasi digital, namun perkembangan teknologi yang pesat juga membuka celah serangan yang semakin kompleks. Tidak hanya hacker individual, tetapi juga aktor negara, kelompok kriminal terorganisir, hingga operasi intelijen modern dapat melumpuhkan sistem nasional tanpa satu pun peluru ditembakkan. Di tengah lanskap ancaman inilah Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menyelenggarakan Admin Game Keamanan Siber, sebuah simulasi dan forum kolaboratif yang digelar pada 5–6 November 2025 di Graha Jalapuspita, Jakarta.

Admin Game ini dirancang sebagai arena bersama bagi kementerian/lembaga, praktisi siber, akademisi, dan sektor strategis untuk berlatih menghadapi skenario serangan digital yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Kehadiran Deputy Bidang Geostrategi DPN me-

wakili Wakil Menteri Pertahanan dalam pembukaan acara menegaskan urgensi kegiatan ini. Beliau mengingatkan bahwa serangan siber kini hadir tidak hanya sebagai kriminalitas digital, tetapi juga sebagai bentuk perang generasi baru: information warfare, cyber warfare, cognitive warfare, hingga konsep futuristik neocortex warfare—ancaman yang dapat melemahkan negara tanpa kontak fisik apa pun.

Kegiatan ini melibatkan banyak pemangku kepentingan strategis—Kementerian Komunikasi dan Informatika, BSSN, sektor kesehatan, energi, hingga lembaga keamanan maritim dan kebencanaan. Laporan media mencatat sekitar 300 peserta mengikuti sesi simulasi dan panel diskusi, memperlihatkan bahwa isu keamanan siber telah dipandang sebagai masalah kolektif yang melintasi batas kelembagaan. Kehadiran lembaga think-tank seperti Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI) turut memperkaya pemetaan ancaman dengan perspektif strategis yang lebih luas.

Salah satu pesan kunci yang muncul

dari diskusi adalah kenyataan bahwa koordinasi pertahanan siber Indonesia masih bersifat sektoral. Banyak kementerian dan lembaga bekerja dalam silo masing-masing, padahal ancaman siber menyerang secara horizontal melintasi sektor energi, kesehatan, telekomunikasi, perdagangan digital, bahkan pertahanan negara. Tanpa kerangka koordinasi terpadu dan arsitektur kebijakan yang menyatukan respons, Indonesia berpotensi lambat dalam menghadapi serangan besar.

Admin Game kemudian berfungsi sebagai “laboratorium kebijakan” yang menguji kesiapan teknis, kecepatan koordinasi, sekaligus kemampuan pengambilan keputusan para pemangku kepentingan. Melalui simulasi krisis, peserta belajar memetakan risiko, menetapkan prioritas, dan mengoordinasikan langkah mitigasi dalam waktu singkat. Kegiatan ini juga

Hasil dari rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi kebijakan yang konkret bagi pemerintah, terutama dalam memperbarui regulasi keamanan siber, memperkuat prosedur operasional standar, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di seluruh kementerian dan lembaga. Lebih jauh lagi, Admin Game ini membuka ruang terciptanya ekosistem pertahanan siber yang inklusif melibatkan pemerintah, lembaga pertahanan dan keamanan, sektor swasta, dunia akademik, hingga masyarakat. Dalam konteks ancaman yang terus berevolusi, ketahanan siber tidak bisa dibangun oleh satu institusi saja, melainkan melalui jaringan kolaborasi yang matang.

Pada akhirnya, Admin Game Keamanan Siber DPN hadir sebagai cerminan bahwa keamanan nasional tidak lagi hanya berwujud tank, kapal perang, atau personel militer. Keamanan



membuka kembali diskusi mengenai perlunya regulasi keamanan siber yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika ancaman yang berkembang pesat.

Selain mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, Admin Game bertujuan menghasilkan rekomendasi kebijakan strategis. Rekomendasi tersebut mencakup sinkronisasi prosedur keamanan siber antar-K/L, penguatan mekanisme berbagi informasi ancaman, peningkatan kemampuan deteksi dini, serta langkah pemutakhiran peraturan yang terkait dengan penanganan insiden siber. Kegiatan ini juga mendorong terbentuknya ekosistem pertahanan siber inklusif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan komunitas profesional.

kini juga berada pada pusat data, jaringan listrik, rumah sakit, sistem pelabuhan, layanan telekomunikasi, hingga perangkat di genggaman masyarakat. Mengamankan ruang digital berarti menjaga denyut nadi negara modern.

Dengan semakin tipisnya batas antara dunia fisik dan digital, Indonesia membutuhkan benteng siber yang kokoh dan terkoordinasi. Inisiatif seperti Admin Game DPN menjadi pijakan penting dalam membangun budaya kesiapsiagaan, memperkuat kepercayaan lintas sektor, dan memastikan bahwa negara memiliki strategi yang tepat dalam menghadapi ancaman masa depan. Jika dijalankan secara berkelanjutan, kegiatan ini dapat menjadi tonggak penting menuju Indonesia yang tidak hanya melek digital, tetapi juga tangguh, adaptif, dan berdaulat di ruang siber.



ASN DPN ikuti Latsarmil Komcad Matra Darat di Pusdikzi

Oleh : Natalina Pakpahan S.I.Kom

Pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) dan penetapan Komponen Cadangan (Komcad) Matra Darat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Gelombang III TA 2025 resmi berakhir dengan upacara penetapan di Lapangan Asrama Pusdikzi Pusziad Lawanggintung, Bogor, Jumat (21/11). Kegiatan ini merupakan rangkaian program pembinaan Komcad yang dipersiapkan untuk memperkuat komponen pertahanan negara, khususnya di matra darat, dengan melibatkan unsur ASN dan CPNS di lingkungan Kemhan termasuk 4 orang ASN perwakilan dari Dewan Pertahanan Nasional, sebagai bagian dari kekuatan cadangan yang terlatih dan siap dimobilisasi bila diperlukan.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan upacara pembukaan Latsarmil Komcad Matra Darat PNS dan PPPK UO Kemhan Gelombang III TA 2025 di Pusdikzi Pusziad, Bogor, pada Rabu, 8 Oktober 2025. Upacara dipimpin oleh Kepala Badan Cadangan Nasional (Kabacadnas) Kemhan Letjen TNI Gabriel Lema, yang sekaligus membacakan amanat Menteri Pertahanan RI

Sjafrie Sjamsoeddin. Dalam amanat tersebut, Menhan menegaskan bahwa keikutsertaan ASN dan CPNS Kemhan dalam Latsarmil Komcad merupakan wujud nyata semangat Bela Negara dan pengabdian kepada NKRI, serta menandai peran ganda mereka sebagai abdi negara di bidang administrasi dan sebagai kekuatan cadangan pertahanan.

Selama beberapa pekan pelatihan di lingkungan Asrama dan Lapangan Pusdikzi Pusziad Lawanggintung, Bogor, para peserta Latsarmil digembleng melalui kurikulum yang dirancang untuk membentuk disiplin, meningkatkan ketahanan fisik dan mental, serta menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan Bela Negara. Materi yang diberikan mencakup pengetahuan dasar kemiliteran, tata upacara, kemampuan baris-berbaris, pengenalan pertempuran jarak dekat, hingga pemahaman mengenai prosedur penanganan ancaman dan situasi darurat. Pelatihan ini diproyeksikan agar ASN dan CPNS Kemhan tidak hanya memahami aspek kebijakan dan administrasi pertahanan, tetapi juga memiliki kesiapsiagaan dasar sebagai bagian dari Komcad Matra Darat.

Puncak kegiatan ditandai dengan upacara penetapan Komcad Matra Darat ASN dan CPNS Kemhan Gelombang III TA 2025 pada 21 November 2025. Dirjen Potensi Pertahanan (Pothan) Kemhan Laksda TNI Sri Yanto bertindak sebagai inspektur upacara (Irup) dan secara resmi menetapkan 257 peserta yang dinyatakan lulus Latsarmil sebagai anggota Komcad Matra Darat. Dalam amanat yang dibacakannya, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta yang telah berhasil menyelesaikan pelatihan, sekaligus mengingatkan bahwa status sebagai Komcad membawa tanggung jawab moral untuk menjadi teladan dalam mencintai Tanah Air dan menjaga nama baik Kementerian Pertahanan di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil latihan, para anggota Komcad yang baru ditetapkan menampilkan demonstrasi kemampuan di hadapan pejabat Kemhan dan TNI yang hadir. Berbagai atraksi militer ditampilkan, antara lain kolone senapan, pencak silat militer, pertempuran jarak dekat, simulasi pembebasan tawanan, hingga demonstrasi penanganan bahan peledak atau *Explosive Ordnance Disposal* (EOD). Selain itu, ditampilkan pula tari modern

sebagai simbol kekompakan, kreativitas, dan semangat generasi muda ASN pertahanan. Di penghujung acara, Dirjen Pothan ikut berpartisipasi dalam sesi tari bersama anggota Komcad sebagai wujud keakraban, sebelum rangkaian upacara ditutup dengan penghormatan pasukan melalui defile.

Pelaksanaan Latsarmil dan penetapan Komcad Matra Darat ASN dan CPNS Kemhan Gelombang III TA 2025 ini memiliki makna strategis bagi penguatan pertahanan negara. Di satu sisi, kegiatan ini menambah jumlah personel Komcad Matra Darat yang siap dimobilisasi ketika negara menghadapi ancaman serius. Di sisi lain, program ini memperkuat basis Bela Negara di kalangan ASN Kemhan, yang diharapkan tidak hanya berperan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, tetapi juga memahami secara langsung karakter ancaman dan kebutuhan operasional pertahanan. Sinergi kelembagaan antara Kemhan dan TNI AD melalui Pusdikzi Pusziad dalam penyelenggaraan Latsarmil menunjukkan komitmen bersama untuk membina Komcad secara berkelanjutan sebagai salah satu pilar penting dalam sistem pertahanan negara yang bersifat semesta.

Dengan berakhirnya rangkaian kegiatan ini, sebanyak 257 ASN dan CPNS Kemhan kini secara resmi menyandang status sebagai Komponen Cadangan Matra Darat. Mereka diharapkan terus menjaga integritas, meningkatkan kapasitas dan wawasan strategis, serta menjadi duta Bela Negara di lingkungan kerja dan masyarakat. Penetapan Komcad Gelombang III TA 2025 ini sekaligus menegaskan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia tidak hanya bertumpu pada komponen utama TNI, tetapi juga didukung oleh komponen cadangan yang berasal dari unsur aparatur sipil yang terlatih, profesional, dan berkomitmen tinggi terhadap keutuhan NKRI.



Sinergi Komunikasi Publik untuk Pertahanan Negara

Oleh : Yayat Ruhiat, A.Md



Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menyelenggarakan Forum Tematik Bakohumas bertema “Sinergi Komunikasi Publik dalam Penguatan Pertahanan Negara: Pengenalan Peran, Tugas, dan Fungsi Dewan Pertahanan Nasional” pada Selasa, 14 Oktober 2025 di Gedung Pierre Tendean, Kementerian Pertahanan RI, Jakarta Pusat. Forum ini menghadirkan para praktisi kehumasan pemerintah untuk memahami bagaimana komunikasi publik berperan langsung dalam memperkuat ketahanan nasional, sekaligus memperluas pemahaman tentang mandat dan fungsi kelembagaan DPN.

Acara dibuka dengan sambutan Sekretaris DPN, Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan T., M.D.S., M.S.P., yang diwakili oleh Deputi Bidang Geoekonomi Dr. Yayat Ruyat, M.Eng. Dalam sambutannya yang singkat namun

menegaskan arah besar kelembagaan, ia menyampaikan bahwa pembentukan DPN melalui Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 merupakan pijakan penting untuk menciptakan kebijakan pertahanan yang lebih terpadu, adaptif, dan responsif terhadap dinamika lingkungan strategis. Ia menyoroti perlunya sinergi lintas sektor agar kebijakan pertahanan nasional bergerak selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

Sambutan berikutnya dari Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Komunikasi dan Media Massa, Dra. Molly Prabawaty, M.AP., menegaskan bahwa komunikasi publik kini menjadi elemen pertahanan yang tidak dapat dipisahkan dari ruang digital. Dengan meningkatnya ancaman kejahatan siber dan tingginya tingkat disinformasi, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara institusi pertahanan dan para pengelola komunikasi pemerintah untuk menjaga ketahanan informasi nasional.

Memasuki sesi utama, forum menghadirkan Laksamana TNI (Purn) Siwi Sukma Adji, S.E., M.M., Anggota Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan DPN, sebagai narasumber yang memberikan paparan mendalam mengenai posisi strategis DPN dalam arsitektur pertahanan negara. Ia menguraikan bahwa DPN bukan sekadar lembaga penasehat, tetapi merupakan pusat perumusan kebijakan pertahanan nasional yang berfungsi menyatukan perspektif militer dan non-militer. Berdasarkan amanat Perpres 202/2024 serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, DPN memiliki mandat untuk memberi pertimbangan strategis kepada Presiden, menyusun arah kebijakan terpadu, serta merumuskan solusi kebijakan yang mencakup aspek kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

Dalam paparannya ia menekankan bahwa pertahanan negara hari ini tidak dapat dipahami hanya dari sisi kekuatan militer. Tantangan pertahanan di era modern bersifat multidimensi—meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, hingga teknologi dan informasi. Karena itu,



keterlibatan masyarakat sipil, pelaku ekonomi, akademisi, industri, dan unsur komunikasi publik menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan daya tangkal bangsa. Ia mencontohkan bagaimana disinformasi, serangan siber, perang pengaruh, serta ketergantungan teknologi dapat menjadi ancaman strategis yang tidak kalah berbahaya dari agresi fisik, sehingga membutuhkan kesiapsiagaan seluruh komponen nasional.

Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipandu oleh Kolonel Inf Rio Akmal Syahbana, S.H., M.I.P.,. Para peserta menyoroti persoalan-persoalan krusial yang dihadapi oleh pemerintah saat ini, seperti bagaimana menanggulangi disinformasi yang terorganisir, meningkatkan

literasi digital masyarakat, serta memperkuat mekanisme koordinasi antarkementerian dalam penanganan ancaman nonmiliter. Diskusi juga menyinggung langkah strategis dalam memperkuat wilayah perbatasan melalui pemberdayaan masyarakat lokal, peningkatan kapasitas aparat, dan optimalisasi peran pemerintah daerah.

Tidak hanya itu, isu generasi muda turut menjadi pembahasan menarik. Peserta dan narasumber sepakat bahwa anak muda adalah kekuatan strategis yang harus dirangkul dalam membangun pertahanan nirmiliter. Dengan karakter adaptif dan melek teknologi, generasi muda dinilai memiliki potensi besar dalam melawan silent war di era digital mulai dari melawan hoaks hingga meningkatkan kesadaran terhadap ancaman siber nasional.

Melalui forum ini, Dewan Pertahanan Nasional menegaskan kembali komitmennya dalam memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergi lintas sektor untuk menghadapi kompleksitas persoalan pertahanan di era global. Dengan komunikasi publik yang kuat, terarah, dan adaptif, Indonesia diyakini mampu menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan seluruh rakyatnya di tengah dinamika ancaman yang terus berkembang.



Delegasi DPN RI Laksanakan Rangkaian Kunjungan Strategis ke Uni Emirat Arab

Oleh : Yayat Ruhiat, A.Md

Delegasi Dewan Pertahanan Nasional Republik Indonesia (DPN RI) yang dipimpin oleh Dr. Yayat Ruyat, M.Eng., Deputy Bidang Geoekonomi, melaksanakan rangkaian Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Uni Emirat Arab pada 27 September–2 Oktober 2025. Rangkaian kegiatan ini bertujuan memperkuat diplomasi pertahanan, kerja sama geoekonomi, ketahanan energi, serta kolaborasi industri strategis antara Indonesia dan UEA. Delegasi turut didampingi oleh Marsda TNI Surya Chandra Siahaan, Brigjen TNI Heriyanta I. Sembiring, dan Kolonel Laut (P) Agustinus Djoko Priyanto, bersama Duta Besar RI untuk UEA dan Atase Pertahanan KBRI Abu Dhabi dalam beberapa agenda.

Kunjungan ke KJRI Dubai

Kunjungan diawali dengan pertemuan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Dubai pada 28 September. Kunjungan ini bertujuan memperkuat koordinasi kelembagaan, khususnya dalam mendukung diplomasi pertahanan, geoekonomi, serta kepentingan nasional Indonesia di kawasan Timur Tengah. Melalui dialog dengan jajaran KJRI, delegasi mempe-

roleh gambaran aktivitas diplomatik dan ekonomi yang dijalankan perwakilan RI di Dubai dalam mendukung komunitas Indonesia di luar negeri.

Kunjungan ke ITPC Dubai

Pada hari yang sama, delegasi melanjutkan agenda ke Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Dubai. Pertemuan diterima langsung oleh Direktur ITPC, Widy Haryono, yang memaparkan sejumlah isu strategis terkait praktik ekspor Indonesia, mulai dari tantangan transaksi internasional, kendala pembayaran, hingga kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai prosedur ekspor seperti kontrak dagang, inspeksi kualitas, serta penggunaan metode pembayaran aman seperti CAD dan DAP. ITPC Dubai juga menyoroti pentingnya pendampingan pemerintah untuk memperkuat kemampuan UMKM dan meningkatkan keberlanjutan ekspor nasional. Diskusi ini memberikan wawasan tambahan bagi delegasi mengenai perkembangan dan peluang ekspor Indonesia di pasar nonmigas, termasuk pentingnya diversifikasi dan industrialisasi bernilai tambah.

Kunjungan ke UAE National Guard

Pada 29 September, delegasi DPN RI melaksanakan kunjungan kehormatan ke markas UAE *National Guard* di Abu Dhabi. Kunjungan turut didampingi oleh Duta Besar RI untuk UEA, H.E. Husin Bagis, serta Atase Pertahanan KBRI Abu Dhabi, Brigjen TNI Tony Aris. rombongan diterima oleh Major General Saleh Mohammed bin Megrin Al Ameri.

Dalam pertemuan ini, Dr. Yayat Ruyat menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan dan memperkenalkan peran DPN RI sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan strategis kepada Presiden RI di bidang pertahanan. Dialog antara kedua belah pihak berfokus pada pengalaman UEA dalam membangun kekuatan guard force, perlindungan objek vital negara, serta peluang pengembangan kapasitas dan kerja sama teknologi pertahanan.

Indonesia–UAE Workshop on High Technology Industries

Pada 30 September, delegasi menghadiri “The 1st Indonesia–UAE Workshop on High Technology Industries” di Dubai *World Trade Center. Workshop* ini dibuka oleh Duta Besar RI untuk UEA, H.E. Husin Bagis, bersama CEO Baker Tilly UAE, Mr. Saad Maniar. Delegasi Dewan Pertahanan Nasional Republik Indonesia (DPN RI) berperan aktif dalam The 1st Indonesia–UAE *Workshop on High Technology Industries* di Dubai World Trade Center pada 30 September 2025. Dalam forum ini, Dr. Yayat Ruyat, M.Eng. tampil sebagai panelis pada sesi Naval Platform, Marsda TNI Surya Chandra Siahaan berperan sebagai Senior Advisor pada sesi Aerospace Platform, dan Brigjen TNI Heriyanta I. Sembiring menjadi respondent untuk sesi Research and Technology Platform, sementara Kolonel Laut (P) Agustinus Djoko Priyanto hadir mendampingi delegasi. Workshop yang juga mencatat penandatanganan MoU antara INFO-GLOBAL dan AMMROC terkait kerja sama Avionic Solutions ini memperkuat jejaring strategis serta membuka peluang kolaborasi teknologi tinggi antara Indonesia dan Uni Emirat Arab.

Kunjungan ke Mubadala Energy

Pada 1 Oktober, delegasi DPN RI mengunjungi Mubadala Energy, sebuah perusahaan energi global yang berbasis di Abu Dhabi. Rombongan diterima oleh Chief Corporate Support Officer, Naser Ali Al Hajri. Dalam pertemuan ini, Mubadala memaparkan portofolio energi yang

mencakup energi fosil, transisi menuju energi terbarukan, serta berbagai proyek strategis di Indonesia seperti PLTS pedesaan dan eksplorasi gas alam di Andaman dan Kalimantan Timur. Delegasi juga memperoleh penjelasan mengenai peran Sovereign Wealth Fund Abu Dhabi, termasuk Mubadala Investment Company, ADQ, dan ADIA, dalam mendorong investasi strategis di sektor energi dan infrastruktur.

Kunjungan ke Masdar Energy

Pada hari yang sama, delegasi melanjutkan kunjungan ke Masdar Energy, perusahaan energi terbarukan dan kawasan berwawasan lingkungan di Abu Dhabi. Delegasi diterima oleh *Chief Investment Officer*, Raphael Barreau. Pembahasan meliputi pengembangan PLTS, smart sustainable city, dan peluang kolaborasi riset serta transfer teknologi energi hijau. Proyek PLTS Cirata 150 MW di Jawa Barat menjadi salah satu contoh keberhasilan kerja sama Indonesia–UEA yang dapat diperluas ke proyek-proyek energi terbarukan lain di masa depan.

Kunjungan ke EDGE Group

Menutup rangkaian kegiatan, delegasi berkunjung ke EDGE Group, perusahaan pertahanan nasional UEA. Delegasi diterima oleh *Senior Vice President* EDGE Group, Miles Chambers, bersama Director of Business Development, Oliver Pearse. Diskusi membahas berbagai peluang kerja sama industri pertahanan seperti kerjasama senapan serbu untuk TNI, pembangunan kapal patroli maritim, rencana transfer teknologi, dan potensi produksi lokal di Indonesia. EDGE Group juga menyampaikan adanya fasilitas pembiayaan hingga 9 miliar dolar AS untuk mendukung proyek-proyek strategis pertahanan Indonesia melalui skema soft loan. Delegasi DPN RI menilai tawaran ini sebagai bentuk komitmen UEA dalam memperkuat kemitraan industri pertahanan dan mendorong pertumbuhan sektor teknologi militer yang berdaya saing tinggi di Indonesia.

Rangkaian kunjungan ini menegaskan komitmen DPN RI dalam memperkuat diplomasi pertahanan, kerja sama geoekonomi, serta kolaborasi teknologi dan energi dengan Uni Emirat Arab. Melalui dialog dan pertukaran pengalaman di berbagai lembaga strategis, DPN RI memperoleh wawasan penting bagi penguatan kebijakan pertahanan nasional dan hubungan Indonesia–UEA ke depan.



Penguatan Interoperabilitas Alutsista TNI Untuk Pertahanan Nasional Terpadu

Oleh : Laksma TNI Indra Agus Wijaya, S.H.

Modernisasi pertahanan Indonesia dalam dua dekade terakhir membuat jajaran alutsista TNI tampak semakin impresif. Kapal, pesawat, radar, dan sistem pertahanan darat hadir dari berbagai negara dengan teknologi yang berbeda-beda. Namun di balik deretan alat perang canggih itu, muncul satu persoalan krusial: bagaimana membuat semua sistem ini benar-benar bisa “berbicara” dan bekerja bersama dalam satu operasi terpadu? Di sinilah isu interoperabilitas alutsista menjadi fondasi pertahanan nasional, khususnya pada aspek komando dan kendali (C2), komunikasi, sistem senjata, dan penginderaan.

Interoperabilitas sendiri dipahami sebagai kemampuan sistem atau unit militer yang berbeda untuk bekerja efektif bersama melalui keseragaman standar teknis, arsitektur data, serta kompatibilitas protokol dan prosedur operasi. Pointers diskusi Lembaga KERIS mene-

gaskan bahwa interoperabilitas bukan sekadar urusan kabel, radio, dan konektivitas perangkat keras, melainkan strategi arsitektural dalam mendesain jejaring komunikasi dan sistem informasi pertahanan nasional. Dalam bingkai Perisai Trisula Nusantara, integrasi lintas matra darat–laut–udara menjadi kunci untuk membangun pertahanan berbasis keunggulan informasi, bukan hanya keunggulan jumlah platform.

Pada tataran teknis, tantangan terbesar datang dari keragaman asal negara produsen alutsista. Setiap sistem membawa “dunianya” sendiri: sistem operasi berbeda, protokol komunikasi berbeda, hingga skema enkripsi yang tidak selalu kompatibel. Karena itu naskah kebijakan ini mendorong pembentukan interoperability layer, yakni lapisan integrasi yang memungkinkan pertukaran data antar berbagai jenis kapal, pesawat, radar, dan sistem pertahanan darat tanpa harus menyeragamkan semua alat.



Lapisan inilah yang kelak melahirkan gambaran situasi bersama (common operational picture) yang sama di hadapan para komandan lintas matra.

Namun interoperabilitas tidak akan pernah tercapai bila tidak ada standarisasi dan integrasi yang disepakati bersama. Blueprint lintas matra (AD–AL–AU) diperlukan untuk mengatur protokol data, klasifikasi keamanan informasi, serta skema integrasi sensor, platform, dan sistem komando. Dengan blueprint ini, setiap pengadaan alutsista baru tidak lagi hanya dinilai dari kecanggihan teknis, tetapi juga dari sejauh mana ia bisa “masuk” ke arsitektur pertahanan digital Indonesia.

Semakin banyak sistem yang terhubung, semakin besar pula permukaan serangan di ruang siber. Integrasi sistem pertahanan otomatis meningkatkan kerentanan terhadap peretasan, penyadapan, dan serangan siber lain yang

dapat mengacaukan data operasi. Karena itu, aspek keamanan siber dan penguatan SDM digital pertahanan menjadi perhatian utama. Diperlukan personel yang mampu mengoperasikan, memelihara, sekaligus mengamankan sistem mulai dari pusat komando hingga terminal di lapangan, dengan kompetensi yang terus ditingkatkan melalui pendidikan berstandar internasional dan kemitraan industri-akademik.

Di luar faktor teknologi, ada pula tantangan organisasional. Kultur organisasi yang masih cenderung matra-sentris sering kali menghambat integrasi lintas sistem. Naskah ini menegaskan bahwa prinsip jointness harus dijadikan dasar operasi militer masa depan: perencanaan, latihan, hingga doktrin harus didesain untuk operasi gabungan, bukan sekadar kerja sama insidental. Dengan demikian, transformasi menuju interoperabilitas bukan hanya soal mengganti dan menghubungkan alat, tetapi juga mengubah cara berpikir dan bekerja seluruh ekosistem pertahanan.

Sebagai penutup, naskah ini menempatkan interoperabilitas alutsista sebagai fondasi daya tangkal pertahanan nasional berbasis informasi. Keberhasilan Indonesia membangun sistem pertahanan modern tidak diukur dari berapa banyak dan seberapa canggih alutsistanya, melainkan dari kemampuan mengintegrasikan semua sistem menjadi satu kesatuan operasi digital yang solid.

Untuk itu, diajukan lima rekomendasi kebijakan:

- (1) membangun Arsitektur Nasional Interoperabilitas Pertahanan yang mengatur standar komunikasi, protokol data, dan keamanan siber;
- (2) menerapkan Sistem Integrator Nasional guna mengoordinasikan akuisisi dan integrasi teknologi antarmatra;
- (3) mewajibkan evaluasi interoperabilitas dalam setiap proses pengadaan alutsista baru;
- (4) menyusun blueprint standar data lintas matra sekaligus membangun Digital Maritime Backbone; serta
- (5) memperkuat SDM teknis dan keamanan siber pertahanan melalui pendidikan berstandar internasional dan kemitraan industri-akademik.

Dengan agenda tersebut, interoperabilitas tidak lagi berhenti sebagai jargon teknis, tetapi menjadi motor transformasi menuju pertahanan nasional yang benar-benar terpadu, adaptif, dan berdaya tangkal tinggi di era kompetisi strategis berbasis informasi.

OPINI

Indonesia menargetkan diri menjadi negara maju pada 2045. Dalam *Global Innovation Index* (GII), posisi Indonesia membaik dari peringkat 85–89 sebelum 2021 menjadi 75 (2022), 61 (2023), dan 54 (2024). Capaian ini menunjukkan penguatan ekosistem riset dan inovasi, tetapi belum menjawab pertanyaan utama: apakah masyarakat luas sudah benar-benar terlibat, atau inovasi masih berputar di kampus besar, lembaga riset, dan korporasi di kota metropolitan?

Inovasi Bukan Sekadar Teknologi Tinggi

Secara hukum, UU No. 18 Tahun 2002 memaknai inovasi sebagai hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan yang melahirkan penerapan baru ilmu pengetahuan dan teknologi. Everett M. Rogers menekankan inovasi sebagai ide atau praktik baru yang bermanfaat dan diadopsi masyarakat. Jadi, inovasi bukan hanya teknologi canggih, melainkan cara baru memecahkan masalah: mengelola air bersih, mengolah hasil panen, atau memanfaatkan media digital untuk usaha kecil. Idealnya, ekosistem inovasi mempertemukan pemerintah, kampus, dunia usaha, komunitas, dan media dalam kolaborasi yang setara sesuatu yang hingga kini masih jauh dari kenyataan.

Jakarta Sentris dan “Pulau-Pulau Inovasi”

Fasilitas riset, laboratorium modern, maker space, dan pusat inovasi masih terpusat di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Di sana, akses peralatan, pelatihan, jejaring, dan kompetisi inovasi relatif melimpah. Sebaliknya, daerah tertinggal kekurangan infrastruktur, pendampingan, dan pendanaan. Potensi kearifan lokal dari teknologi pangan tradisional hingga irigasi komunitas sering berhenti sebagai praktik setempat tanpa dukungan negara. Ekosistem inovasi pun tampak seperti pulau-pulau yang maju sendiri-sendiri, belum membentuk jaringan nasional yang inklusif.

Lima Simpul Masalah dalam Ekosistem Inovasi

Penulis menggarisbawahi lima masalah utama partisipasi inovasi masyarakat. Pertama, literasi inovasi rendah; UMKM dan komunitas belum melihat inovasi sebagai alat strategis, masih dianggap urusan “orang pintar” dan “dunia kampus”. Kedua, infrastruktur inovasi dan

Memperkuat Partisipasi Publik untuk Ekosistem Inovasi Nasional

Oleh : Darnis, S.E., M.Han.

akses teknologi terbatas di luar kota besar: internet, komputer, ruang kerja bersama, dan peralatan eksperimen belum memadai. Ketiga, skema insentif dan pendanaan komunitas minim; ide warga sering kandas karena tidak ada dana awal, sementara program micro-grants masih jarang dan sulit diakses. Keempat, kolaborasi antar pemangku kepentingan lemah; riset kampus kerap tak terhubung kebutuhan riil masyarakat dan orientasi bisnis industri. Kelima, tata kelola inovasi belum partisipatif; warga jarang dilibatkan sejak awal dalam penetapan prioritas riset dan inovasi.

Membumikan Inovasi: Dari Literasi hingga Forum Kolaborasi

Agar inovasi terasa hingga tingkat desa, policy brief ini menawarkan lima arah kebijakan. Pertama, mengarusutamakan literasi inovasi berbasis komunitas melalui pelatihan di balai desa, sekolah, pesantren, dan lokakarya UMKM, dengan bahasa yang sederhana dan dekat keseharian. Kedua, membangun dan memperkuat innovation hubs di provinsi dan kabupaten strategis sebagai simpul akses fas-



itas, teknologi tepat guna, dan jejaring mentor–peneliti–investor bagi beragam komunitas.

Ketiga, mengembangkan skema pendanaan ramah komunitas berupa *microgrants* dan *matching grants* yang transparan dan inklusif, sehingga eksperimen lokal di bidang sampah, energi terbarukan skala desa, atau pengolahan hasil pertanian dapat tumbuh. Keempat, membentuk forum koordinasi multipihak di tingkat nasional dan daerah yang mempertemukan pemerintah, kampus, dunia usaha, komunitas, dan media untuk menyelaraskan agenda riset dengan kebutuhan nyata warga dan prioritas pembangunan. Kelima, menyusun indikator kinerja inovasi masyarakat meliputi jumlah dan sebaran inovasi komunitas, keterlibatan kelompok rentan, serta dampak sosial-ekonomi agar monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara terukur.

Inovasi sebagai Gerakan Kebangsaan

Indonesia Emas 2045 tidak akan lahir hanya dari laboratorium canggih atau ruang rapat di ibu kota, melainkan ketika inovasi

menjadi cara bangsa memecahkan masalah di kampung dan kota, oleh profesor maupun petani, insinyur maupun pelaku usaha rumahan. Tugas pemerintah bukan sekadar mengerek peringkat indeks global, tetapi memastikan setiap warga punya peluang relatif setara untuk menjadi inovator.

Penguatan literasi, pembangunan pusat inovasi daerah, pendanaan komunitas, tata kelola partisipatif, dan kolaborasi lintas sektor adalah langkah konkret menuju ekosistem inovasi yang inklusif. Pada akhirnya, inovasi yang merata bukan sekadar agenda teknokratik, melainkan gerakan kebangsaan agar tak ada wilayah dan kelompok masyarakat yang tertinggal dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045.



Bukan Sekadar Mutasi: Strategi Menempatkan ASN di Lembaga Baru

Oleh : Afifah Rizky Ramadhani, S.I.P

Di balik setiap lembaga baru yang dibentuk pemerintah, entah itu dewan, badan, atau pusat ada satu faktor penentu yang sering terlewat dari perhatian publik: siapa ASN yang mengisinya, dan bagaimana mereka ditempatkan. Di atas kertas, lembaga baru dibentuk untuk menjawab tantangan nasional yang makin kompleks. Namun di lapangan, lembaga-lembaga ini kerap tersandung masalah klasik: pegawai terbatas, kompetensi tidak pas, budaya kerja lama masih melekat, dan sistem merit belum benar-benar menjadi panglima.

Penempatan ASN di lembaga baru seharusnya menjadi momen strategis untuk “memulai dari nol dengan cara yang benar”. Faktanya, banyak ASN ditempatkan tanpa mempertimbangkan kesesuaian latar belakang pendidikan dan pengalaman dengan kebutuhan jabatan. Mereka butuh waktu adaptasi panjang, produktivitas turun, sementara tuntutan kinerja lembaga sudah tinggi sejak hari pertama. Situasi ini diperparah oleh keterbatasan jumlah pegawai redistribusi dari instansi lama sering hanya

mengalirkan pegawai dengan kompetensi menengah, karena yang terbaik enggan dilepas.

Tantangan berikutnya datang dari budaya birokrasi lama. ASN yang sudah nyaman dengan pola kerja konvensional sering gagap ketika masuk lingkungan lembaga baru yang diharapkan lebih lincah, inovatif, dan kolaboratif. Minimnya komunikasi dan sosialisasi dari pimpinan membuat resistensi terhadap perubahan makin kuat. Di sisi lain, sistem merit yang seharusnya menjadi fondasi penempatan pegawai masih lemah. Pertimbangan non-kinerja kedekatan, like and dislike, atau tarikan politik masih bisa menyusup dalam proses penempatan. Akibatnya, rasa keadilan terganggu, motivasi turun, dan loyalitas pegawai pada lembaga ikut tergerus.

Ketidakesesuaian kompetensi membebani kinerja, ketiadaan pelatihan memperlambat adaptasi, lemahnya merit system memukul motivasi, sementara ketidakjelasan karier menambah tekanan psikologis. Jika dibiarkan, lembaga baru akan “tua sebelum waktunya”: lelah, lamban, dan kesulitan membangun citra di mata

publik.

Penempatan ASN pada lembaga baru menghadapi setidaknya enam tantangan besar. Pertama, ketidaksesuaian kompetensi yang memperlambat adaptasi dan menghambat pencapaian kinerja. Kedua, keterbatasan jumlah pegawai yang menimbulkan beban kerja berlebih dan menurunkan motivasi. Ketiga, resistensi budaya birokrasi lama yang membuat lembaga baru kehilangan momentum awalnya. Keempat, lemahnya sistem merit yang membuka ruang bagi praktik non-objektif dalam penempatan. Kelima, minimnya program pelatihan dan pengembangan, yang seharusnya menjadi instrumen utama mempercepat adaptasi ASN. Keenam, rendahnya motivasi dan kepastian karier yang menimbulkan tekanan psikologis serta mengurangi loyalitas ASN.

Untuk memutus lingkaran ini, dibutuhkan strategi manajemen SDM yang jauh lebih serius. Penerapan sistem merit harus menjadi pintu masuk utama: setiap penempatan ASN didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan rekam jejak kinerja. Setelah itu, lembaga baru wajib menyiapkan paket lengkap pengembangan pegawai, pelatihan teknis, manajerial, hingga program mentoring agar ASN tidak dibiarkan belajar sendiri. Di level kepemimpinan, figur yang dibutuhkan adalah pemimpin transformasional: mampu memberikan visi yang jelas, menginspirasi, sekaligus membangun komunikasi dua arah sehingga resistensi berubah menjadi partisipasi.

Insentif pun perlu dipikirkan ulang. Bukan hanya soal tunjangan, tetapi juga peluang promosi, akses pelatihan, dan pengakuan formal atas kinerja. Semua itu akan menjadi sinyal bahwa lembaga baru bukan “buangan”, melainkan ruang peluang karier. Di era digital, pemanfaatan teknologi dalam administrasi kepegawaian juga tak bisa ditawar: sistem digital terpadu akan memudahkan pemetaan kompetensi, mengurangi subjektivitas penempatan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Jika langkah-langkah ini dijalankan, dampaknya tidak hanya dirasakan di dalam kantor. Pelayanan publik akan lebih profesional dan responsif, karena pegawai bekerja pada posisi yang tepat dengan dukungan kompetensi yang memadai. Budaya organisasi baru akan terbentuk lebih cepat: adaptif, inovatif, dan berorientasi hasil. Pada gilirannya, kepercayaan publik terhadap lembaga baru dan terhadap reformasi bi-

rokrasi secara keseluruhan akan ikut menguat. Hal-hal yang direkomendasikan antara lain: Menetapkan regulasi khusus tentang penempatan ASN berbasis sistem merit.

Menyediakan program pelatihan dan orientasi wajib bagi ASN yang dipindahkan ke lembaga baru.

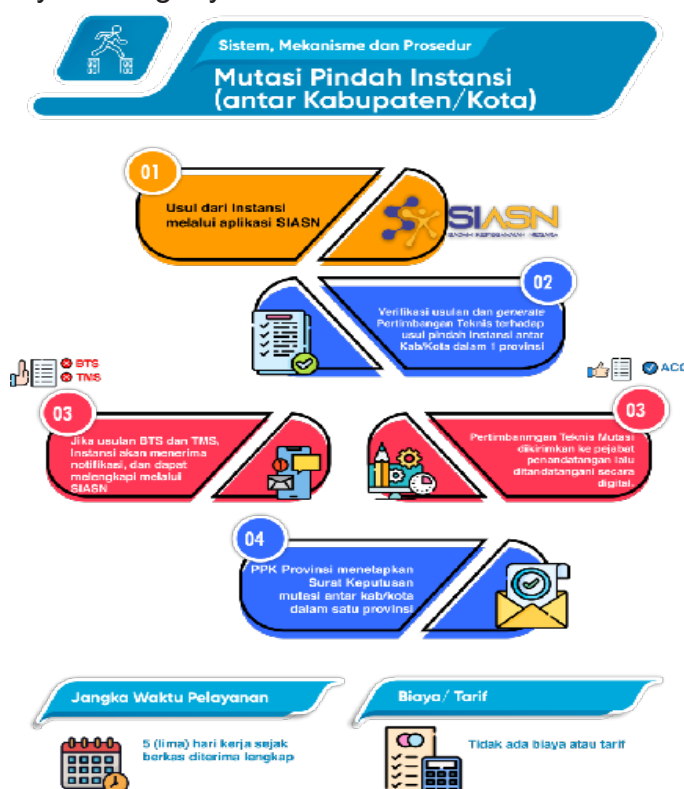
Mengembangkan sistem digital SDM terintegrasi untuk pemetaan kompetensi nasional.

Memperkuat kapasitas kepemimpinan transformasional di lingkungan birokrasi.

Membangun skema insentif yang adil dan transparan untuk meningkatkan motivasi ASN.

Menyusun strategi komunikasi internal yang konsisten agar ASN memahami visi dan peran mereka dalam lembaga baru.

Penempatan ASN pada lembaga baru adalah kebijakan strategis yang menentukan keberhasilan birokrasi di Indonesia. Tantangan seperti ketidaksesuaian kompetensi, keterbatasan jumlah pegawai, lemahnya merit system, dan minimnya dukungan pengembangan harus dijawab dengan strategi MSDM yang terintegrasi. Karena itu, penempatan ASN di lembaga baru tidak boleh lagi dipandang sebagai urusan administrasi rutin. Ia adalah kebijakan strategis yang menentukan apakah lembaga baru akan tumbuh menjadi motor perubahan, atau justru menambah daftar panjang institusi yang berjalan tanpa daya. Singkatnya, di era birokrasi modern, cara kita menempatkan ASN adalah cermin kesungguhan negara dalam melayani warganya.





Lembaga Nonstruktural Dalam Perspektif Kelembagaan Instansi Pemerintah Pusat

Oleh: Dawud Setianto, S.IP, M.Ec.Dev.

Dewasa ini, secara kelembagaan terdapat beberapa instansi pemerintah pusat mencakup lembaga tinggi negara (lembaga yang tercantum dalam konsep trias politica meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif), kementerian, lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), lembaga non struktural dan lembaga lainnya (dinyatakan lain oleh Presiden). Salah satu instansi pemerintah yang menarik untuk dibahas adalah Lembaga Non Struktural (LNS). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 1, Lembaga Nonstruktural, yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga selain kementerian atau selain lembaga pemerintah nonkementerian yang dibentuk dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerin-

tah, atau Peraturan Presiden yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Struktur organisasi LNS terdiri atas *board* (forum) dan sekretariat jenderal/sekretariat sebagai penunjang pelayanan. Unsur *board* merupakan jabatan non ASN yang diisi banyak kalangan sedangkan Sekretariat merupakan jabatan ASN yang bisa diisi oleh PNS, PPPK maupun TNI/Polri. Nomenklatur pada *board* di setiap LNS berbeda-beda sesuai kebutuhan seperti: Komisioner, dewan, deputi, direktur eksekutif, tenaga ahli dan lain-lain. Adapun untuk fasilitas keuangan di board/forum dibayarkan melalui Peraturan Presiden yang mengatur hak keuangan dengan sistem single salary, termasuk pem-

bayaran tunjangan hari raya maupun tunjangan lainnya. Sedangkan untuk jabatan di Sekretariat Jenderal/Sekretariat, fasilitas keuangan menyesuaikan aturan pada Aparatur Sipil Negara mencakup gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja.

Berikut beberapa karakteristik Lembaga Nonstruktural :

1. Tugasnya belum diampu oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Tugas dari LNS terutama di forum (board) memiliki karakteristik khusus seperti memberi rekomendasi kebijakan di bidang tertentu yang tidak diampu oleh Kementerian/LPNK.

2. Pimpinan bersifat kolektif kolegal.

Pimpinan LNS tidak tunggal tetapi kolektif dan kolegal, walaupun setiap LNS memiliki Ketua/Kepala tetapi untuk pengambilan keputusan biasanya akan diputuskan bersama anggota yang lain melalui rapat pimpinan baik rapat dewan/komisioner/anggota dan lain-lain.

3. Beberapa Pimpinan LNS Ketua dan Anggotanya dipilih oleh DPR.

Pimpinan di beberapa LNS pemilihannya melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

4. Kedudukan lembaga bukan bagian dari kabinet.

Kedudukan LNS bukan bagian dari kabinet (eksekutif) karena sebagai advisor (penasehat kebijakan) bukan menjalankan teknis kerja pemerintahan secara umum.

5. Anggota LNS terdiri dari TNI/Polri, ASN/Profesional dan masyarakat.

Anggota LNS bisa berasal dari berbagai unsur baik TNI/Polri, ASN, Profesional maupun masyarakat, jabatan anggota di LNS bukan merupakan jabatan di ASN.

A. Lembaga Non Struktural Mandiri

Ciri dari Lembaga Non Struktural Mandiri adalah terdapat unsur eselon I dalam LNS tersebut, nomenklatur eselon I yang umum ada di LNS mandiri adalah Sekretaris Jenderal yang merupakan fungsi pelayanan kepada Pimpinan LNS. Struktur Sekretariat Jenderal di LNS Mandiri cukup lengkap mulai dari unsur eselon I sampai dengan eselon IV, Jabatan Fungsional dan Pelaksana. LNS ini berdiri sendiri dan bisa mengelola organisasi secara mandiri baik perencanaan, keuangan, kepegawaian, produk hukum, inspektorat/unit pengawasan, Unit Kerja

Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Barang Milik Negara, dan lain-lain. Tunjangan Kinerja ASN di Sekretariat LNS ini diatur sendiri dalam Perpres Tunjangan Kinerja dan melaksanakan penilaian Reformasi Birokrasi secara mandiri. Beberapa contoh LNS mandiri: Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman RI, Dewan Ketahanan Nasional RI, Komnas HAM.

B. Lembaga Non Stuktural Non Mandiri

Ciri dari Lembaga Non Struktural Non Mandiri adalah tidak terdapat unsur eselon I dalam LNS. Jabatan ASN tertinggi di LNS ini adalah eselon II yang biasanya dijabat oleh Kepala Sekretariat yang merupakan fungsi pelayanan kepada Pimpinan LNS. Struktur sekretariat LNS terdiri dari eselon II sampai dengan eselon IV, Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Sekretariat LNS Non Mandiri menempel pada Kementerian yang memiliki fungsi beririsan dengan LNS tersebut, sehingga tidak memiliki DIPA sendiri, tidak memiliki Pejabat Pembina Kepegawaian, tidak memiliki unit inspektorat dan tata kelola barang milik negara berada di Kementerian, Tunjangan Kinerja ASN di Sekretariat LNS ini mengikuti Perpres Tunjangan Kinerja Kementerian beririsan dengan Tugas Pokok dan Fungsinya termasuk penilaian Reformasi Birokrasinya. Beberapa contoh LNS Non Mandiri: Dewan Pertahanan Nasional, Komisi Kepolisian Nasional, Dewan Ekonomi Nasional, Kantor Komunikasi Presiden, Kantor Staf Kepresidenan, Bappisus, Komisi Penyiaran Indonesia dan lain-lain.

Secara kelembagaan model Lembaga Struktural yang paling ideal adalah mandiri, karena kemandirian LNS dengan bisa mengatur tata kelola instansinya sendiri mempercepat afirmasi kendala yang dihadapi karena tidak harus melalui kementerian tempat LNS menginduk. Konsep LNS sebenarnya adalah bebas nilai/tekanan politik, karena LNS merupakan lembaga advisory/think tank yang diharapkan output/produknya langsung bisa diterima oleh Presiden, ini yang menjadi kelebihan dibandingkan dengan lembaga lain. Oleh karena itu, model kelembagaan LNS harus tetap di mutakhirkan sesuai dengan tuntutan dan kendala di lapangan, sehingga LNS bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan lebih baik.

Infrastruktur merupakan tulang punggung pembangunan. Jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, sekolah, hingga sistem digital pemerintahan adalah fondasi yang menentukan seberapa cepat sebuah negara tumbuh dan seberapa merata manfaat pembangunan dirasakan masyarakat. Namun, di balik berbagai proyek yang telah berdiri megah, pertanyaan penting tetap mengemuka: **apakah kualitas infrastruktur publik hari ini telah sejalan dengan besarnya anggaran yang dikeluarkan negara?**

Pertanyaan ini penting, sebab pembangunan bukan sekadar soal banyaknya proyek yang diselesaikan, melainkan nilai manfaat, ketahanan, serta dampak jangka panjang terhadap masyarakat. Masyarakat menaruh harapan bahwa anggaran yang dikelola pemerintah—yang bersumber dari pajak dan dana publik—digunakan dengan efektif, tidak hanya terserap, tetapi benar-benar menghasilkan layanan yang berkualitas.

Ketika Infrastruktur Dibangun, Kualitas Tidak Boleh Menjadi Nomor Dua

Kita sering mendengar kritik mengenai jalan yang baru diaspal tetapi cepat rusak, gedung yang baru diresmikan namun sudah mengalami keretakan, atau fasilitas publik yang terlihat megah tetapi kurang terpelihara. Kritik-kritik ini bukan sekadar keluhan, tetapi cerminan bahwa kualitas masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Infrastruktur berkualitas buruk pada akhirnya akan menambah beban negara. Proyek yang harus diperbaiki berulang kali akan menggerus anggaran perawatan dan mengurangi ruang fiskal untuk sektor yang lebih produktif. Di sinilah perlunya tata kelola anggaran yang berbasis efektivitas, bukan sekadar tingkat penyerapan.

Efektivitas Anggaran: Lebih dari Sekadar Belanja yang Cepat

Dalam perspektif publik, efektivitas anggaran tidak hanya diukur dari penyerapannya, tetapi dari hasil yang dapat dilihat dan dirasakan. Tiga prinsip utama dapat menjadi pijakan:

1. Perencanaan yang Berbasis Kebutuhan Nyata

Pembangunan harus berpijak pada analisis kebutuhan yang matang, bukan sekadar mengejar target proyek. Infrastruktur yang dibangun harus menjawab persoalan masyarakat, bukan hanya memperbanyak daftar pembangunan.



Oleh : Guspahri Ardiansyah Hasibuan, S.Kom.

2. Pengawasan dan Transparansi

Mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal, harus berjalan lebih kuat. Setiap proses pengadaan, kontrak kerja, hingga pelaporan anggaran harus transparan agar publik yakin bahwa setiap rupiah dikelola secara bertanggung jawab.

3. Pemeliharaan yang Berkelanjutan

Infrastruktur tidak berhenti pada peresmian. Tanpa perawatan rutin, kualitas akan cepat menurun, dan anggaran perbaikan akan membengkak. Pemerintah perlu memastikan bahwa pemeliharaan mendapatkan porsi anggaran yang memadai dan direncanakan sejak awal.

Masyarakat Menginginkan Pembangunan yang Sedikit Tapi Berkualitas

Ada kecenderungan bahwa pembangunan diukur dari banyaknya proyek baru. Pada-



Kualitas Infrastruktur Publik & Efektivitas Anggaran

Menata Pembangunan agar Lebih Tepat Guna

hal, infrastruktur yang sedikit tetapi berkualitas jauh lebih bernilai daripada banyak proyek yang tidak bertahan lama. Di era keterbatasan fiskal, pemerintah perlu lebih selektif dan strategis dalam menentukan prioritas pembangunan.

Infrastruktur yang kuat akan menjadi modal bagi peningkatan investasi, konektivitas antarwilayah, serta efisiensi aktivitas masyarakat. Sedangkan infrastruktur yang rapuh justru memperlambat mobilitas, menimbulkan biaya tinggi, dan melemahkan daya saing.

Meneguhkan Komitmen untuk Pembangunan yang Lebih Efektif

Penguatan kualitas infrastruktur dan efektivitas anggaran adalah komitmen bersama. Pemerintah perlu memastikan standarisasi teknis yang ketat, transparansi anggaran, serta evaluasi menyeluruh terhadap setiap proyek.

Dunia usaha perlu mengikuti etika kerja konstruksi yang baik. Masyarakat pun berperan dalam mengawasi dan menjaga fasilitas publik yang telah dibangun.

Pada akhirnya, pembangunan infrastruktur bukan hanya tentang membangun fisik, tetapi membangun kepercayaan. Kepercayaan bahwa anggaran negara digunakan dengan bijaksana. Kepercayaan bahwa setiap proyek memberikan manfaat nyata. Dan kepercayaan bahwa pembangunan yang dilakukan hari ini akan menjadi warisan yang bermanfaat bagi generasi mendatang.

Infrastruktur berkualitas adalah investasi jangka panjang. Jika dikelola dengan efektif dan bertanggung jawab, pembangunan bukan hanya memperkuat fondasi ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat.

Kenaikan Gaji Aparatur Negara 2025:

Pemerintah Tetapkan Perpres 79 Tahun 2025

Oleh : Natalina Pakpahan, S.I.Kom

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara. Regulasi ini menjadi dasar hukum resmi bagi kenaikan gaji aparatur negara pada tahun 2025, sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat kesejahteraan dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur negara.

Penerbitan Perpres 79/2025 dilakukan dengan pertimbangan kebutuhan strategis nasional, dengan beberapa tujuan utama:

1. Menjaga Daya Beli dan Stabilitas Ekonomi ASN
Dinamika harga dan tekanan inflasi beberapa tahun terakhir berdampak pada pendapatan riil ASN dan aparat keamanan. Penyesuaian gaji ini diperlukan agar kesejahteraan aparatur tetap terjaga dan pelayanan publik berjalan optimal.
2. Mendukung Reformasi Birokrasi Nasional
Pemerintah terus mendorong modernisasi birokrasi, termasuk perbaikan sistem penggajian dan pendekatan performance-based. Kenaikan gaji dalam Perpres 79/2025 sejalan dengan agenda penyederhanaan struktur penghasilan dan peningkatan budaya kerja aparatur.
3. Memperkuat Moril Aparat Pertahanan dan Keamanan
Bagi prajurit TNI dan anggota Polri, peningkatan kesejahteraan berdampak langsung pada kesiapan bertugas, disiplin, dan stabilitas moral kesatuan. Pemerintah memastikan aparatur pertahanan-keamanan mendapatkan dukungan yang layak sesuai risiko pekerjaan.
4. Menjamin Standar Penghasilan Pejabat Negara
Penyesuaian gaji bagi pejabat negara dilakukan un-



tuk menjaga integritas jabatan publik, menarik talenta terbaik, dan mendukung kualitas pengambilan kebijakan.

Poin Utama Kebijakan

1. Penyesuaian Gaji Pokok
Pemerintah menaikkan gaji pokok ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara secara nasional, sesuai struktur penghasilan dan tanggung jawab jabatan masing-masing.
2. Penyederhanaan Struktur Penggajian
Kenaikan tahun 2025 selaras dengan agenda reformasi sistem remunerasi nasional, termasuk penyederhanaan komponen penghasilan dan penguatan sistem berbasis kinerja (performance-based).
3. Penguatan Moral dan Kesiapan Aparatur Pertahanan–Keamanan
Untuk TNI/Polri, peningkatan gaji diarahkan untuk memperkuat moral satuan, disiplin, serta kesiapsiagaan dalam menjalankan operasi pertahanan dan keama-



nan dalam negeri.

4. Jaminan Standar Integritas Pejabat Negara
Penyesuaian penghasilan pejabat negara diterapkan untuk menjaga profesionalitas, kualitas pengambilan kebijakan, dan menarik talenta berkualitas ke sektor publik.

5. Dasar Penyesuaian APBN 2025

Perpres 79/2025 menjadi dasar hukum bagi alokasi belanja pegawai dalam APBN Tahun Anggaran 2025, memastikan konsistensi fiskal dan tata kelola anggaran yang akuntabel.

Tujuan dan Dampak Kebijakan

Kenaikan gaji melalui Perpres 79 Tahun 2025 bertujuan untuk:

- menjaga kesejahteraan dan daya beli aparatur negara,
- meningkatkan kualitas pelayanan publik,
- memperkuat stabilitas pertahanan dan keamanan,
- mendukung reformasi birokrasi menuju pemerintahan modern yang efektif dan akuntabel.

Kenaikan gaji melalui Perpres 79/2025 diproyeksikan memberi dampak positif pada:

- Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui motivasi kerja yang lebih baik.
- Stabilitas pertahanan dan keamanan karena meningkatnya moral TNI/Polri.
- Penguatan integritas ASN dan pejabat negara melalui peningkatan kesejahteraan dasar.
- Percepatan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern.

Pemerintah meyakini bahwa peningkatan kesejahteraan aparatur negara akan berkontribusi terhadap pelayanan yang lebih responsif, peningkatan integritas, serta penguatan kehadiran negara dalam berbagai sektor strategis.

Dengan terbitnya Perpres 79 Tahun 2025, pemerintah menegaskan langkah strategis dalam memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan dan mendorong aparatur negara untuk memberikan kinerja terbaik bagi masyarakat. Pemerintah berkomitmen memastikan implementasi kebijakan ini berjalan efektif, transparan, dan sesuai prinsip akuntabilitas.



Waktu adalah salah satu konsep paling dekat dengan kehidupan manusia, namun sekaligus paling sulit dipahami. Di bawah ini adalah lima fakta menarik tentang waktu yang dapat membantu kita memahami bahwa dunia tidak sesederhana angka 24 jam di jam dinding.

1. Satu hari di Bumi tidak persis 24 jam

Selama ini, kita diajarkan bahwa satu hari terdiri dari 24 jam. Namun, dalam kenyataannya, panjang satu hari di Bumi tidak selalu tepat 24 jam. Secara astronomis, satu hari ditentukan oleh waktu yang dibutuhkan Bumi untuk berotasi satu kali penuh pada porosnya.

Dalam praktiknya, rotasi Bumi tidak benar-benar konstan. Ada banyak faktor yang memengaruhi, seperti interaksi gravitasi dengan Bulan dan Matahari, pergerakan massa di dalam Bumi, serta perubahan distribusi air dan udara di permukaan planet. Akibatnya, panjang hari bisa sedikit lebih panjang atau lebih pendek dari 24 jam.

Rata-ratanya, satu hari “sebenarnya” di Bumi bahkan bisa berbeda beberapa menit dari 24 jam. Selisih kecil ini tidak terasa dalam kehidupan sehari-hari karena sistem penanggalan dan jam modern sudah disesuaikan agar tetap praktis digunakan manusia.

hidupan sehari-hari karena sistem penanggalan dan jam modern sudah disesuaikan agar tetap praktis digunakan manusia.

2. Ada dua pulau yang berbeda waktu hingga 21 jam

Zona waktu biasanya kita bayangkan berbeda jauh pada wilayah yang letaknya juga sangat berjauhan. Namun, ada contoh unik di mana dua wilayah yang sangat dekat justru memiliki perbedaan waktu yang sangat besar.

Contoh paling menarik adalah dua pulau kecil yang disebut Pulau Diomede. Pulau-pulau ini terletak di antara Alaska (AS) dan Siberia (Rusia) dan hanya dipisahkan oleh jarak sekitar 3 kilometer saja.

- Pulau Diomede Kecil (Little Diomede) berada di wilayah Amerika Serikat.
- Pulau Diomede Besar (Big Diomede) berada di wilayah Rusia.

Di antara keduanya, melintas Garis Tanggal Internasional (International Date Line) yang membagi tanggal di Bumi. Akibat perbedaan zona waktu dan tanggal tersebut, selisih waktu antara kedua pulau ini bisa mencapai sekitar 21 jam, meskipun jarak fisiknya sangat dekat.

5 Fakta Ilmiah tentang Waktu yang Jarang Diketahui

Oleh : Natalina Pakpahan, S.I.Kom

Secara sederhana, jika Anda berada di satu pulau, Anda seolah “melihat ke masa depan” atau “masa lalu” hanya dengan memandang pulau di seberangnya.

3. Dulu kalender hanya memiliki 10 bulan

Saat ini kita mengenal kalender dengan 12 bulan dalam setahun dan jumlah hari sekitar 365 hari (atau 366 hari pada tahun kabisat). Namun, sistem ini tidak selalu seperti itu sepanjang sejarah peradaban manusia. Pada masa awal Kekaisaran Romawi, digunakan kalender Romawi yang hanya terdiri dari 10 bulan dengan total sekitar 304 hari dalam setahun. Bulan-bulan “musim dingin” awalnya tidak dihitung secara jelas dalam kalender karena dianggap kurang relevan untuk aktivitas pertanian dan sosial saat itu.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan administrasi negara, sistem kalender ini kemudian mengalami beberapa kali reformasi. Bulan-bulan baru ditambahkan, penyesuaian dilakukan agar lebih selaras dengan peredaran Bumi mengelilingi Matahari, hingga akhirnya lahirlah sistem kalender yang kita gunakan sekarang (kalender Masehi/Gregorian) dengan 12 bulan dan pengaturan tahun kabisat. Perubahan ini menunjukkan bahwa cara manusia mengukur waktu selalu berkembang mengikuti kebutuhan sosial, politik, dan ilmiah.

4. Waktu tidak bisa dihentikan

Dalam cerita fiksi dan film superhero, kita sering melihat tokoh yang memiliki kekuatan untuk menghentikan waktu. Gambaran ini menarik imajinasi, namun secara ilmiah, menghentikan waktu adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin dilakukan oleh manusia.

Albert Einstein, melalui teori relativitas, menjelaskan bahwa waktu berkaitan erat dengan kecepatan dan ruang. Salah satu implikasinya adalah, untuk “memperlambat” waktu secara ekstrem, sebuah objek harus bergerak mendekati kecepatan cahaya.

Namun, ada batasan fisika yang tidak dapat dilampaui:

- Tidak ada objek bermassa yang dapat bergerak lebih cepat dari cahaya.
- Untuk mendekati kecepatan cahaya saja, dibutuhkan energi yang nyaris tak terbatas.

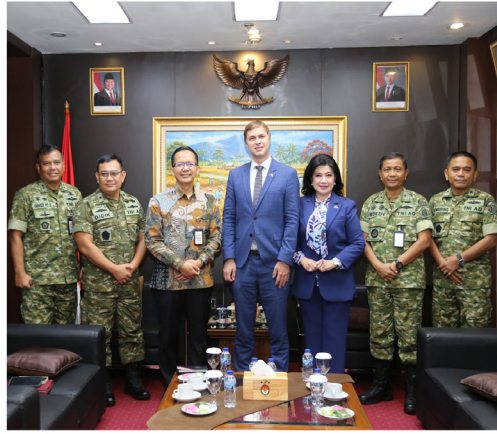
Dengan demikian, konsep menghentikan waktu seperti dalam film—di mana semua benda dan makhluk berhenti, sementara satu orang tetap bebas bergerak—tidak sesuai dengan hukum fisika yang saat ini kita pahami. Waktu, di dunia nyata, terus berjalan dan tidak bisa dihentikan.

5. Tidak ada “sekarang” yang benar-benar tetap

Dalam percakapan sehari-hari, kita sering menggunakan kata “sekarang” untuk menunjukkan momen tertentu, misalnya “sekarang jam 10”. Namun, dari sudut pandang ilmiah dan filosofis, “sekarang” adalah konsep yang sangat rumit. Saat seseorang mengucapkan kata “sekarang”, pada kenyataannya waktu terus bergerak maju. Bahkan, ketika kalimat tersebut selesai diucapkan, momen yang dimaksud sudah berlalu. Jadi, “sekarang” sebenarnya bukan titik waktu yang dapat “dibekukan” atau ditahan, melainkan lebih merupakan persepsi mental manusia terhadap aliran waktu.

Selain itu, kecepatan cahaya dan jarak antarbenda di alam semesta membuat dua orang yang berada di tempat berbeda bisa saja tidak sepakat sepenuhnya terhadap apa yang disebut sebagai “sekarang”. Dalam relativitas, urutan peristiwa dapat terlihat berbeda bagi pengamat yang bergerak dengan kecepatan berbeda. Artinya, “sekarang” lebih dekat kepada cara otak kita memberi makna pada pengalaman, bukan suatu titik objektif yang universal.

GALERY







DEWAN PERTAHANAN NASIONAL

**SELAMAT TAHUN BARU
2026**



www.dpn.go.id



[dewanpertahanannasional](https://www.instagram.com/dewanpertahanannasional)



Dewan
Pertahanan
Nasional



[dewanpertahanan](https://twitter.com/dewanpertahanan)



[dpn_r1](https://www.youtube.com/dpn_r1)